

Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat

Oleh:

Murdianto¹

murdianto@uinmataram.ac.id

Muhammad Miki²

Muhammadmiki24@gmail.com

Alaluddin³

jalaluddyn10@gmail.com

Abstark: Islamic boarding schools are informal educational institutions in Indonesia whose existence from the past until now is still in demand by the community. Public interest in pesantren is due to the fact that pesantren institutions are able to adapt to the progress of the world of education. Pesantren do not only focus on religious education materials, but also focus on general community-based materials, so that Islamic boarding schools are considered capable of fulfilling the needs of society in the modern era. In principle, Islamic boarding schools always make the community the basis of ideas or focus bases in determining learning strategies and educational materials. In this study, the authors focus on how Islamic boarding schools manage education based on community needs and the ability of pesantren to respond to contemporary studies.

Keywords: *Education, Islamic Boarding School, Society, Globalization*

Abstark: pesantren merupakan Lembaga pendidikain informal di Indonesia yang keberadaannya dari dulu hingga sekarang masih diminati oleh masyarakat. Minat masyarakat terhadap pesantren disebabkan karena Lembaga pesantren mampu menyesuaikan diri terhadap kemajuan dunia Pendidikan. Pesantren tidak hanya fokus pada materi-materi Pendidikan yang bersifat religius, melainkan juga fokus pada materi-materi umum yang berbasis masyarakat, sehingga pesantren dianggap mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di era modern. Pesantren pada prinsipnya selalu menjadikan masyarakat sebagai basis ide atau basis fokusnya dalam menentukan strategi pembelajaran maupun materi-matri Pendidikan. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada

¹ Dosen UIN Mataram, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, prodi PMI

² Mahasiswa UIN Mataram, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, prodi MD

³ Mahasiswa UIN Mataram, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, prodi MD

bagaimana pesantren dalam mengelola Pendidikan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan kemampuan pesantren dalam merespon kemajian zaman.

Kata Kunci: *Pendidikan, Pesantren, Masyarakat, Globalisasi*

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam berbasis masyarakat merupakan tuntutan masyarakat itu sendiri yang dilindungi oleh undang-undang sistem pendidikan nasional. Masyarakat dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik, fungsional simbiotik dan equal. Dari satu segi masyarakat memengaruhi pendidikan, dan dari sisi lain pendidikan memengaruhi masyarakat⁴. Apalagi di era globalisasi yang mulai didengungkan dengan begitu keras telah melanda dunia sejak memasuki abad ke-20. Namun sesungguhnya, globalisasi ini telah berlangsung sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang dimulai dari Timur Tengah melalui jalur *religio-intelektual* dan dalam kurun waktu tertentu bernuansa *religio-politik* yang dewasa ini yang diwarnai dengan nuansa dunia Barat⁵ yang lebih bersifat *sosio-ekonomik* bahkan *sosio-cultural*.

Saat ini, Pendidikan Islam yang secara kelembagaan pada umumnya dikelola dengan pola pondok pesantren, telah berdiri jauh sebelum kemerdekaan dan sampai saat ini masih tetap eksis menjalankan kegiatannya meskipun dengan pola yang nyaris tidak pernah berubah. Modernisasi pondok pesantren telah dimulai dengan adanya pemikiran-pemikiran baru agar dapat menerima peradaban global secara cerdas karena menutup diri terhadap perubahan akan membuat kita tergilas roda kemajuan itu, akan tetapi terlalu membuka diri akan membuat kita kehilangan jatidiri dan kepribadian.⁶

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas telah menempatkan pondok pesantren pada posisi yang cukup strategis sebagai salah satu bentuk pendidikan berbasis masyarakat yang telah mengakomodir segala tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat berarti pendidikan yang berasal dari, dan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pendidikan semacam ini adalah bentuk pendidikan yang dibuka atas swakarsa dan swadaya masyarakat

⁴ Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2014, hal.60.

⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999, hal.43-44.

⁶ Machali, *et.al*, *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi; Buah Pikiran Seputar; Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2004, hal.10.

dan inilah yang disebut demokratisasi pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4, pasal 8, dan pasal 9 sebagai berikut:

Pasal 4 :“pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Pasal 8 :”masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”.

Pasal 9 :”masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan⁷”.

Ketiga pasal tersebut cukup memberikan kesempatan yang besar bagi masyarakat untuk merencanakan, mendirikan, menyelenggarakan, menumbuhkan, mengembangkan, mengawasi, mengevaluasi, dan menindaklanjuti segala bentuk program pendidikan menurut agama, kultur, dan pluralitas yang ada di dalam komunitasnya.

B. Pembahasan

1. Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat

a) Pengertian

Dalam memahami makna pendidikan berbasis Islam masyarakat, terlebih dahulu disajikan makna pendidikan secara umum baik dari segi etimologi maupun terminologi. Pendidikan dalam bahasa Yunani disebut dengan *paedagogy* yang berarti seseorang yang keluar ke sekolah dan kembali dari sekolah diantarkan oleh seorang pelayan yang disebut *paedagogos*, sedangkan dalam bahasa Romawi disebut *educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Bahasa Inggris menyebutkan mirip dengan bahasa Romawi yaitu *to educate* yang mengandung makna memperbaiki moral dan melatih intelektual.⁸ Ketiga bahasa yang merupakan bahasa rujukan dalam kebanyakan produk ilmiah-dalam memformulasi pemaknaan kegiatan pendidikan-tersebut

⁷ Undang-Undang No. 20. Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung ; Fokus Media, 2010. Cet. III. Hal, 29

⁸ Noeng Muhajir dalam Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta, Ar-Ruz Media, 2006. hal.19.

ternyata memiliki inti pesan yang sama yakni sebuah usaha sadar⁹ yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk menemukan sesuatu, mewujudkan sesuatu yang masih belum terwujud, melakukan perbaikan dan melatih suatu kemampuan yang masih bersifat verbalistik agar menjadi lebih real dan dapat diukur.

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah disebut lembaga negeri sedangkan yang diselenggarakan oleh masyarakat disebut lembaga swasta. Jumlah lembaga swasta lebih banyak dibandingkan lembaga negeri. Di Indonesia jumlah sekolah mencapai 208 ribu sekolah¹⁰ dan jumlah pondok pesantren mencapai lebih dari 16 ribu pesantren baik tradisional maupun modern.¹¹ Jumlah guru swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (di luar guru Kementerian Agama) mencapai angka 778.954 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat) orang.¹² Ini artinya bahwa pendidikan di negeri ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada masyarakat untuk mengelola pendidikan. Kebijakan semacam ini telah mengarahkan perhatian kepada penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dalam arti pendidikan diselenggarakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

Untuk memahami makna pendidikan berbasis masyarakat, maka ada baiknya mengetengahkan pandangan Mark K. Smith yang berpendapat ; pendidikan berbasis masyarakat adalah suatu proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individu atau kelompok dengan mengikutsertakan orang-orang di dalam wilayah geografis, dan dapat berbagi mengenai kepentingan umum.¹³

⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pendidikan didefinisikan sebagai Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

¹⁰ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160531155543-20-134779/kemendikbud-ingin-perbanyak-sekolah-pengguna-kurikulum-2013/>, diunduh tanggal 3 Januari 2017, pukul 00:25.

¹¹ Afif Hasan, *Ilmu Pendidikan Islam : Refleksi Pencarian Spektrum Pendidikan Islam*, Malang, UM. Press IKIP Malang, 2011, hal.128.

¹² Sumber : Statistik Pendidikan, diolah oleh Sapulidi Riset Center (SRC) LSM Sapulidi tahun 2016, <http://bangimam-berbagi.blogspot.co.id/2016/04/ini-data-guru-honorir-2016.html>, diunduh tanggal 2 Januari 2017, pukul 23:57.

¹³ <http://seputarpendidikan003.blogspot.co.id/2013/06/pendidikan-berbasis-masyarakat.html>, diunduh tanggal 2 Januari 2017, jam 23:45.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 1 ayat 38 dikemukakan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pendidikan Berbasis Masyarakat di samping berbentuk pendidikan formal, Pendidikan Islam berbasis masyarakat juga dapat berbentuk pendidikan informal yang melibatkan Dewan Pendidikan dan Komite sekolah/madrasah. Pendidikan informal yakni pendidikan keluarga dan lingkungan. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Sedangkan komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.¹⁴

Salah satu wujud dari penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, maka pada pasal 53 dan 53A Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan pada :

Ayat (1) satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.

Ayat (2) satuan pendidikan wajib menjamin akses layanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidika khusus, dan layanan khusus. kelompok belajar dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat¹⁵).

- b) Pola Pendidikan Berbasis Masyarakat. *Pertama*, Pendidikan berbasis *social expectation* (harapan masyarakat) Sesungguhnya ada hal lain yang menyebabkan tamatan perguruan tinggi tersebut menjadi penganggur. Yaitu karena tujuan lembaga pendidikan tinggi tersebut tidak berbasis pada *social expectation* (harapan masyarakat). Tujuan pendidikan yang dirumuskan lembaga pendidikan tinggi tersebut tidak memperhitungkan tentang sejauh mana lulusannya itu dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengguna. Dengan kata lain, bahwa rumusan tujuan pendidikan tinggi tersebut tidak berbasis masyarakat. Perlu dicatat, bahwa seluruh kegiatan,

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 1 ayat 39, 41, dan 42.

¹⁵ *Ibid.*

termasuk pendidikan, jika tidak memerhatikan kebutuhan masyarakat, maka dapat dipastikan kegiatan tersebut tidak akan berjalan dan akan ditolak masyarakat.

Kedua, Pendidikan Berbasis Kebutuhan Lapangan Kerja dan Usaha

Untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja sekaligus mengatasi masalah pengangguran, maka pendidikan diupayakan untuk dapat mencetak manusia yang siap bekerja setelah lulus dari sekolah menengah. Pada sekolah menengah jenis ini para siswa dibekali dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan dalam berbagai lapangan kerja dan lapangan usaha, seperti SMK Pariwisata, SMK Teknik, SMK Pertanian, SMK Kesehatan, dan lain-lain.

Ketiga, Pendidikan sebagai Pencetak Ilmuan. Ilmuan atau ulama adalah orang yang memiliki otoritas dalam memberikan analisis dan penjelasan dari sebuah fenomena yang terdapat dalam masyarakat. Kehadiran mereka di masyarakat menjadi model, idola, rujukan dan sumber inspirasi dan motivasi, itulah sebabnya kehadiran mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui pengetahuan, keterampilan, pengalaman, komitmen dan motivasinya yang kuat yang dimiliki para ilmuwan, keadaan masyarakat akan mengalami kemajuan. Kebudayaan dan peradaban yang maju dalam berbagai bidang sebagaimana yang disaksikan di berbagai negara di dunia, terjadi disebabkan karena adanya para ilmuwan yang dihasilkan oleh dunia pendidikan.

Keempat, Pendidikan sebagai Agen Perubahan Sosial. Melalui ilmu pengetahuan, keterampilan serta para ulama dan ilmuwan yang dihasilkan dunia pendidikan, dan kemudian mereka terjun ke masyarakat untuk mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan itu, maka akan menimbulkan perubahan di masyarakat. Seorang sarjana pertanian yang dihasilkan pendidikan tinggi, dan ia memiliki temuan baru dalam bidang pertanian yang inovatif, yang semula satu hektar sawah hanya menghasilkan 6-7 ton, kini bisa menghasilkan 8-10 ton, maka dengan sendirinya pendapatan ekonomi para petani meningkat dan berlipat ganda. Dengan ekonomi yang meningkat dan telah melebihi kebutuhan hidupnya, maka ekonomi tersebut dapat ia gunakan untuk memperbaiki dan membangun rumahnya yang lebih baik dengan perlengkapan yang mewah, memperbaiki infra struktur jalan, peneranga, jalur transportasi, dan sebagainya.

Kelima, Pendidikan sebagai Pencetak Tenaga Kerja. Kualitas tenaga kerja yang bekerja pada berbagai sektor perusahaan, industri, jasa, pertanian, peternakan, seni budaya, dan lain sebagainya, amat bergantung pada kualitas pendidikan yang dimilikinya. Di lembaga pendidikanlah

terdapat miniatur dan sketsa kehidupan yang terdapat dalam masyarakat. Di lembaga pendidikanlah, berbagai model yang ada di masyarakat disajikan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu perlu ada kerja sama yang baik dan fungsional antara dunia pendidikan dengan dunia kerja sehingga menjadi *link in mach* antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Berbagai kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan lembaga pendidikan hendanya berkaitan erat dengan yang terjadi dalam masyarakat.

Keenam, Pendidikan sebagai Pengawas Masyarakat. Pada lembaga pendidikan terdapat orang-orang yang memiliki kompetensi fisik, pancaindera, intelektual, hati nurani (moral), dan spiritual. Mereka itu memiliki berbagai gelar keserjanaan yang disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Mereka mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang telah disepakati kebenarannya oleh para ahli, dan sekaligus mengaplikasikannya kedalam berbagai produk budaya dan peradaban, seperti penggunaannya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, mengembangkan bagai infrastruktur dan berbagai kebutuhan masyarakat, menciptakan peralatan teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan infra struktur, pemeliharaan lingkungan hidup, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Para ahli yang dihasilkan dunia pendidikan itu selanjutnya menjadi pengawas berbagai pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Pendidikanlah yang menilai dan menentukan, apakah sebuah masyarakat sudah tergolong maju atau mundur¹⁶.

2. Upaya-upaya Mewujudkan Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat

Diketahui, bahwa walaupun secara ideal sebagaimana tersebut di atas, tujuan pendidikan Islam memerhatikan pengembangan masyarakat atau berwawasan sosial, namun dalam praktiknya belum semua lembaga pendidikan Islam memerharikannya. Masih terdapat lembaga pendidikan Islam yang tujuannya hanya bersifat keagamaan. Mereka pandai dalam ilmu agama, cakap dalam beribadah, mahir membaca Al-Qur'an, saleh dalam kesehariannya, namun kurang peduli pada masyarakat, bahkan tidak mengetahui cara-caranya agar berguna bagi masyarakat. Hal ini perlu diatasi dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: *pertama*, Memberikan wawasan kemasyarakatan yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang *hablum ninannas* (hubungan baik dengan manusia) harus disandingkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang *hablum minallah* (hubungan baik dengan Allah Swt).

¹⁶ Abuddin Nata., *Sosiologi Pendidikan Islam*. Op.cit, hal. 60-71.

Kedua, Memberikan wawasan, contoh dan praktik mengamalkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan sosial, seperti tolong menolong, berbaik sangka, toleransi, saling menasihati, mengucapkan salam, memberi hormat, memelihara lingkungan, mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan lain sebagainya. *Ketiga*, Menunjukkan contoh-contoh tentang kegiatan sosial yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, seperti contoh penanggulangan banjir; contoh memelihara kebersihan, contoh mengatasi kemiskinan, contoh memberantas kebodohan dan sebagainya¹⁷.

3. Pendidikan Berbasis Ahli Strategi Pesantren

a) Pengertian dan asal mula pesantren

Sebelum tahun 1960-an, pusat-pusat pendidikan pesantren di Indonesia lebih dikenal dengan nama pondok. Istilah pondok barangkali berasal dari pengertian asrama-asrama para santri atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau barangkali berasal dari kata Arab, *funduq*, yang artinya hotel atau asrama. Perkataan pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan pe di depan dan akhiran an berarti tempat tinggal para santri. Profesor Johns berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji sedang C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci Agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci AgamaHindu? Kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.” Dari asal-usul kata santri pula banyak sarjana berpendapat bahwa lembaga pesantren pada dasarnya adalah lembaga pendidikan keagamaan bangsa Indonesia pada masa menganut agama Hindu Buddha yang bernama “mandala” yang diislamkan oleh para kyai. Terlepas dari asal-usul kata itu berasal dari mana, yang jelas ciri-ciri umum keseluruhan pesantren adalah lembaga pendidikanIslam yang asli Indonesia, yang pada saat ini merupakan warisan kekayaan bangsa Indonesia yang terus berkembang. Bahkan padasaat memasuki millennium ketiga ini menjadi salah satu penyangga yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia¹⁸.

b) Pondok Pesantren Konsep Pendidikan Terbaik

Di Indonesia, pesantren dari hari ke hari memiliki perkembangan yang cukup pesat, apalagi didukung dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

¹⁷. Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*. Ibid hal.92-93.

¹⁸ Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren (Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta ;LP3ES, 2011) hal. 41.

Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 1 ayat 38 dikemukakan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dan Sebagai wujud dari penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, maka pada pasal 53 dan 53A Peraturan Pemerintah tersebut pada halaman 6.

Sangat tidak apriori apabila sistem pendidikan yang selama ini dilaksanakan di pondok pesantren dipandang sebagai konsep pendidikan terbaik. Alasan yang mendasari pernyataan ini adalah bahwa ; 1) jumlah pondok pesantren tidak pernah berkurang dari tahun ke tahun bahkan terus bertambah, 2) belum ada pondok pesantren yang bubar karena ditinggalkan oleh santrinya, 3) pesantren selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, 4) kharismatik pimpinannya yang relatif bertahan, 5) pesantren merupakan benteng terakhir pertahanan moral bangsa.¹⁹

Selanjutnya untuk menguatkan teorinya ini, Afif Hasan mengutip pendapat beberapa ilmuwan antara lain; Horiko Horikoshi yang menyebut pesantren sebagai *social change*, Clifford Geertz menyebutnya sebagai *cultural broker*, Komaruddin Hidayat menyebutnya sebagai mediator kehidupan modern dan tradisional, Thoha Hamim menyebutnya sebagai regulator keadaan masyarakat yang tidak menentu, Munandir Soelaiman menyebutnya sebagai stabilisator sama dengan apa yang dikemukakan oleh Atho' Mudzhar, bahkan menurutnya kiprah kiyai di sini diterapkan dengan prinsip *stability and change*.²⁰ Di pondok pesantren dapat diselenggarakan pendidikan sekaligus dengan dua pola yakni pola tradisional dan pola modern, jalur sekolah dan jalur luar sekolah, jenis pendidikan umum dan pendidikan agama.

c) Pesantren dan Modernisasi

Kondisi saat ini, sikap dan keberadaan pesantren terhadap modernisasi terbagi menjadi empat kelompok yaitu ; (1) kelompok yang kurang tanggap karena kurang menyadari diri apakah ia sudah baik ataukah masih kurang baik. Kelompok ini nampaknya mendominasi pesantren yang ada.(2) anggapan bahwa apapun yang diterapkan di pesantren adalah positif dan harus dipertahankan. (3) kelompok yang merasa rendah diri terhadap perubahan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan, dan (4) pesantren yang mau mengoreksi diri

¹⁹ Afif Hasan, *op.cit*, hal.129

²⁰ *ibid*

dan terbuka menerima perubahan. Kelompok terakhir ini jumlahnya paling sedikit.²¹

Salah satu problem yang menjadi salah satu hambatan yang membuat pondok pesantren menjadi cenderung stagnan –meskipun tidak bubar– adalah tradisi pengkultusan terhadap pimpinan yang disebut kiyai (Jawa), tuan guru (Lombok) serta keturunannya yang dilakukan secara berlebihan. Akan tetapi, dengan semakin banyaknya pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, agaknya sikap ini mulai terkikis sedikit demi sedikit sehingga mulai menerima angin perubahan.

Menghadapi perubahan zaman, pesantren harus belajar dari sejarahnya sendiri. Pergeseran fungsi yang berlangsung sesuai tuntutan situasi dan kondisi telah terekam dalam jejak sejarahnya, dimana pada awalnya pesantren berfungsi sebagai tempat penyebaran tasawuf, dakwah agama, pendidikan agama bagi generasi muda, ketika memasuki zaman kolonial telah bertambah fungsi menjadi pusat latihan militer dan penggemblengan semangat nasionalisme melawan penjajah.

Agenda terbesar yang harus dilakukan pesantren adalah: (1) membongkar nalar kritis dengan menciptakan suasana itu dalam dirinya. Kritik terhadap diri sendiri dan kritik terhadap nilai luar yang diadopsi. (2), profesionalisasi lembaga yang mengandung arti tidak hanya bergantung pada *trah* darah sang kiyai tanpa melihat kemampuan emosional-intelektualnya. (3), filterisasi terhadap agenda modernisasi agar dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk²² sebagaimana berfikirnya muslim progresif; *engage with tradition, multiple critique*, dan terbuka terhadap sumber pengetahuan skunder.²³

d) Pesantren dalam dunia global

Saat ini, pesantren dihadapkan pada benturan peradaban di tengah dunia yang sedang mengglobal. Mau tidak mau proses akulturasi harus dilalui. Kualitas iman diperlukan di tengah menjamurnya pemikiran liberal dalam upaya menafsir ulang ajaran agama. Sikap apatis tidak memberikan sumbangan yang layak bagi kemajuan pondok pesantren bahkan membuat pondok tertinggal dan tidak diterima ummatnya sendiri. Kekhawatiran terhadap pesantren ketika berhadapan dengan arus global sesungguhnya tidak beralasan setidaknya dengan dua alasan. *Pertama*, di era global jumlah pesantren tidak menjadi berkurang karena kehilangan peminat, tetapi justru semakin mekar dan semerbak. *Kedua*, para

²¹ H. Amin Haedari, et.al, *Panorama Pesantren Dalam Cakrawala Modern*, Diva Pustaka, Jakarta, 2004, hal.86-87

²² *Ibid*, hal.91-92

²³ Omid Safi, *Progressive Muslim on Justice, Gender, and Pluralism*, England, One World Publications, 2003, hal. 5-15.

petinggi negara, selebriti, bahkan pebisnis kelas nasional ternyata banyak berasal dari kalangan pesantren. Dan tentu sekali pesantren yang bisa memproduksi mereka ini adalah pesantren yang dikelola secara modern tanpa melepaskan atribut tradisionalnya.

Dengan demikian, maka pesantren dari zaman jauh sebelum kemerdekaan telah tumbuh dan maju di zamannya, ketika negeri ini sibuk dengan perjuangan kemerdekaan, pesantren juga mencapai kemajuan zamannya, di era modern dan global inipun kuantitas dan kualitas pondok pesantren sedang “berperang” dengan nilai-nilai yang paradoksal dengan dirinya, tetapi nampaknya juga akan mengalami kemajuan di eranya ini. Singkatnya, pesantren dalam setiap zaman telah membuktikan dirinya mampu menghadirkan sistem pengelolaan yang senantiasa dinamis mengikuti irama perubahan. Dan inilah yang membuatnya tetap bertahan sampai kapanpun.

e) Pesantren dan Sains

Ada Banyak perbedaan yang sangat mencolok antara dunia Timur dan dunia Barat dalam memandang modernisasi. Epistemologi Timur berdiri di atas dua pilar sekaligus yaitu teosentris dan antroposentris, sedangkan epistemologi Barat hanya bersel tunggal yakni positivisme yang menuntut sistematisasi dan alam pikir ilmiah. Walhasil kearifan multidisipliner lebih dititiktekan dalam alam nalar pesantren daripada kearifan interdisipliner yang biasa ditekankan pada alam nalar sains modern.²⁴

Pesantren mengembangkan kematangan spiritual untuk melangkah di jalan menuju Tuhan. Ini tidak berarti bahwa sikap transendentalis pada masyarakat perantren dapat dianggap menghambat laju modernisasi pesantren dan divonis tidak dapat menerima nalar ilmiah (sains). Karena seharusnya, orang-orang pesantrenlah yang terlebih dahulu menerima kehadiran sains sebagai wujud kebenaran paradigma positivisme. Karena al-Qur'an²⁵ memang menantang umat manusia untuk mencari kebenaran (*al-Haq*) itu melalui dua jalur yakni Bumi (alam) dan jiwa manusia (*al-anfus*).

Memandang diri sendiri, seorang ahli mencoba mengajak berkelana ke dunia otak manusia dimana penelitian terhadap otak telah membuktikan bersahabatnya kebenaran *saintifik* yang mengacu pada fakta-fakta, dan kebenaran *Ilahiyah* yang merujuk pada wahyu. Dunia sains mutakhir

²⁴ Mihrab, edisi II, tahun III, November 2005, hal.5

²⁵ QS.Adzaariyat ; 21 menyebutkan “*dan di bumi terdapat sinyal-sinyal (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berkeyakinan. Dan dalam dirimu (juga), maka apakah kamu tidak dapat melihatnya?*”

memperlihatkan kebenaran ajaran agama yang berkembang di dunia Timur yang hampir keseluruhannya memiliki dimensi ilmiah yang spektakuler.²⁶

Ternyata, al-Qur'an telah menempatkan wilayah-wilayah penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hanya dapat dijangkau oleh manusia yang telah dilengkapi dengan potensi kekuatan berupa otak dan segala sistemnya.²⁷ Pemahaman yang terpadu antara sains dan al-Qur'an hanya dapat ditempuh melalui pendalaman terhadap isyarat al-Qur'an yang dapat diperoleh melalui pendidikan di pondok pesantren.

4. Strategi dan langkah pengembangan pesantren

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengelola dan upaya pengembangan kelembagaan pondok pesantren, di antaranya;

a. Membangun kesadaran

Ada beberapa upaya yang harus dilakukan dalam membangun kesadaran mengembangkan kelembagaan pesantren: *pertama*, Menggali jati diri pesantren dengan mencermati nilai-nilai luhurnya, seperti jujur, ikhlas, tanggung jawab, kerja keras, dan tasammuh. *Kedua*, Memahami kekuatan dan kelemahan pesantren. *Ketiga*, Memahami bahwa pesantren memegang amanah pendidikan dari masyarakat bukan sekedar amanah pengajaran, melainkan pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai luhur pesantren

b. Mengembangkan kebersamaan

c. Membangun sistem.²⁸

C. kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis sebagaimana tersebut di atas, dapat kemukakan catatan penutup sebagai berikut; *Pertama*, pendidikan Islam berbasis masyarakat adalah suatu keadaan ideal yang ingin diwujudkan melalui kegiatan pendidikan, baik formal, non-formal maupun informal, seperti terwujudnya manusia yang memiliki keseimbangan antara keunggulan dalam bidang iman-takwa dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan bahasa serta memiliki keinginan yang kuat untuk mendarmabaktikannya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara atas dasar panggilan Tuhan. *Kedua*, pendidikan Islam adalah berbasis masyarakat merupakan pelaksanaan dari visi dan misi pendidikan yang dirumuskan. Untuk itu antara visi, misi dan tujuan pendidikan memiliki hubungan substansial dan fungsional.

²⁶ Taufiq Pasiak, *Revolusi IQ/EQ/SQ ; Menyingkap Rahasia Kecerdasan Berdasarkan Al-Qur'an Dan Neurosains Mutakhir*, Mizan, Bandung, 2008. hal.255-256

²⁷ QS. Al-Rahman : 33

²⁸ .Salahudin Wahid, 2011. Transformasi Pesantren Tebu Ireng, menjaga tradisi di tengah tantangan. UIN Maliki Press, hal. 135-140

Ketiga, pendidikan Islam berbasis masyarakat yang berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah ternyata sangat memerhatikan kepentingan masyarakat, bahkan pendidikan Islam itu sendiri adalah pendidikan yang berwawasan kemasyarakatan atas dasar ajaran Islam. Tujuan pendidikan Islam selain menekankan lahirnya individu yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh, juga memiliki perhatian dan keinginan yang kuat untuk memajukan masyarakat.

Strategi dan sistem pendidikan Islam yang selama ini dilaksanakan di pondok pesantren dipandang sebagai konsep pendidikan terbaik. Alasan yang mendasari pernyataan ini adalah bahwa ; 1) jumlah pondok pesantren tidak pernah berkurang dari tahun ke tahun bahkan terus bertambah, 2) belum ada pondok pesantren yang bubar karena ditinggalkan oleh santrinya, 3) pesantren selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, 4) kharismatik pimpinannya yang relatif bertahan, 5) pesantren merupakan benteng terakhir pertahanan moral bangsa.

Daftar Pustaka

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfazi Al-Qur'an Al-Karim*, CV. Diponegoro, Bandung, 1945
- Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2014
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI, *Panduan Praktis Pelayanan Pondok Pesantren Pada Masyarakat Bidang Ta'lim*, Dirjen Bagais, Direktorat PK Pontren, Proyek Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah Pada Pondok Pesantren, Jakarta, 2004.
- Haedari, H. Amin, dkk, *Panorama Pesantren Dalam Cakrawala Modern*, Jakarta, Diva Pustaka, 2004.
- Hasan, Afif, *Ilmu Pendidikan Islam : Refleksi Pencarian Spektrum Pendidikan Islam*, Malang, UM.Press IKIP Malang, 2011.
- Machali, Imam dan Musthofa, *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi; Buah Pikiran Seputar; Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.
- Mihrab Jurnal, *Pesantren Dan Sains*, edisi II, tahun III, November 2005, Jakarta, Dir PK Pontren dan CV. Kawula Muda, 2005.

- Salahudin Wahid, 2011. *Transformasi Pesantren Tebu Ireng, menjaga tradisi di tengah tantangan*. UIN Maliki Press
- Suwarno, Wiji, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Ar-Ruz Media, Yogyakarta, 2006.
- Paisol, *Gus Dur dan Pendidikan Islam : Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, Jakarta, Ar-Ruz Media, 2011.
- Pasiak, H. Taufiq, *Revolusi IQ/EQ/SQ : Menyingkap Rahasia Kecerdasan Berdasarkan Al-Qur'an Dan Neurosains Mutakhir*, Bandung, Mizan, 2008.
- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160531155543-20-134779/kemendikbud-ingin-perbanyak-sekolah-pengguna-kurikulum-2013/>, diunduh tanggal 3 Januari 2017, pukul 00:25.
- Sapulidi Riset Center (SRC), Statistik Pendidikan, Sapulidi tahun 2016, <http://bangimam-berbagi.blogspot.co.id/2016/04/ini-data-guru-honorer-2016.html>, diunduh tanggal 2 Januari 2007, pukul 23:57.
- Undang-Undang No. 20. Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung ; Fokus Media, 2010. Cet. III.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- <http://seputarpendidikan003.blogspot.co.id/2013/06/pendidikan-berbasis-masyarakat.html>, diunduh tanggal 2 Januari 2017, jam 23:45.